

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2001 (Halim, 2003) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang di revisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang yang luas dan bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakatnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian dan evaluasi termasuk juga dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 pasal 1 mengenai pengelolaan keuangan daerah, ayat 10 menyatakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan dan ayat 11 menyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dan perihal mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah, pasal 101 ayat 1 menyatakan Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana ini digunakan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah. Idealnya daerah otonom mampu menggali sumber keuangannya sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber utama keuangan daerah, tetapi pada prakteknya transfer dari pemerintah pusat masih merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk kegiatan operasionalnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber keuangannya dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD yang mencerminkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial dengan melakukan analisis rasio, yaitu analisis rasio kemandirian, keserasian yang terdiri atas rasio belanja rutin terhadap APBD dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD, dan rasio pertumbuhan yang terdiri atas rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan

pendapatan, rasio pertumbuhan belanja rutin, dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluya (2001) yang melakukan analisis rasio PAD/APBD pada periode 1995 sampai 1999 dan 2000 sampai 2001 menyatakan bahwa masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, sedangkan kemampuan keuangan pemerintah pusat adalah terbatas, dimana Dana Perimbangan hanya terealisasi sebesar sekitar 78%. Haryadi (2002) mencoba menguji pengaruh *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan variabel tingkat kemandirian pembiayaan, variabel tingkat ketergantungan dan variabel desentralisasi fiskal menyimpulkan terjadi penurunan kemampuan pembiayaan daerah dan tingkat desentralisasi fiskal semakin membaik setelah *fiscal stress*, sedangkan tingkat kemampuan mobilisasi semakin membaik dan tingkat ketergantungan semakin menurun. Arifin (2005) melakukan penelitian tentang kinerja keuangan sebelum dan pada saat *fiscal stress* terhadap beberapa kota di propinsi Jawa Barat periode 1995 sampai 2000 menyimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan variabel tingkat kemandirian, variabel tingkat ketergantungan dan variabel desentralisasi fiskal, sebelum *fiscal stress* lebih baik dibanding pada saat *fiscal stress*. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya kinerja keuangan yang diukur dengan tingkat pembiayaan, tingkat ketergantungan, dan tingkat desentralisasi fiskal. Sohidin dan Ngadiman (2005) yang menguji kinerja keuangan APBD

pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun 2000 sampai 2005 menggunakan rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian tidak konsisten dari tahun ke tahun. Pada tingkat keserasian, sebagian besar dana yang ada masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin, sedangkan tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan yang positif.

Penulis menyimpulkan dari beberapa penelitian di atas bahwa penelitian tentang kinerja keuangan daerah masih sedikit maka penulis bermaksud meneliti dan mengambil judul "**Analisis Rasio Keuangan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Madiun sebelum dan sesudah otonomi daerah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah, yaitu : Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun sebelum dan sesudah otonomi daerah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan bukti secara empiris perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun sebelum dan sesudah otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Memberikan wawasan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh ke dalam dunia nyata.

2. Manfaat bagi pemerintah Kota Madiun

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Madiun dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

3. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan informasi tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun.

E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan materi usulan skripsi, penulis membagi skripsi menjadi 5 bab :

1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah teori dan penelitian terdahulu yang merupakan konsep dasar penulisan skripsi, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang desain penelitian, populasi, sampel, definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.